



RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188/ 082 /415.23/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi OPD serta untuk memberikan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan menetapkan dalam Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19)
;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;
2. Mengadakan koreksi dan perbaikan atas hasil pekerjaan tim baik pada sistematika dokumen, tahapan penyusunan maupun pelaporan penulisan;
3. Memberikan kontribusi pemikiran secara aktif terhadap penyempurnaan pekerjaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;

4. Memastikan konsistensi dan arah pekerjaan berdasarkan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman pada ketentuan Peraturan PerUndang- Undangan yang berlaku.

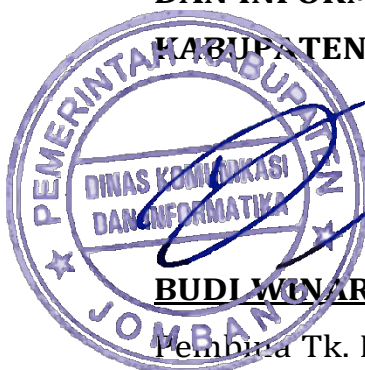
KEEMPAT : Membebaskan segala pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal: 24 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188/082/415.23/2023
TANGGAL : 24 Januari 2022

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kominfo
3	Anggota	Perencana Ahli Muda Kabid Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kabid Aplikasi Teknologi Informasi Kabid Statistik dan Persandian

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 24 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

KABUPATEN JOMBANG



BUDI WINARNO, ST, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19741001 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Bupati R Soedirman 92 Jombang 61419

Telp. 0321879913 fax. 0321 879913

Email: diskominfo@jombangkab.go.id

Website: kominfo.jombangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/110/415.23/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan indikator kinerja SKPD sesuai tugas dan fungsi dalam jangka waktu tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2023.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Belanja yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan.
- KEEMPAT** : Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran.
- KELIMA** : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal: 7 Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

KABUPATEN JOMBANG


BUDI WINARNO, ST, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19741001 199901 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Jombang, 7 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**



BUDI WINARNO, ST, M.Si
Pemhina Tk. I
NIP. 19741001 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	60
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	63
2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat.....	69
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	70
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	74
3.3. Program dan Kegiatan	77
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	94
BAB V PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)	33
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang	58
Tabel	2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	64
Tabel	3.1	Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	87
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dan setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jombang. Renja Tahun 2023 adalah sebuah dokumen perencanaan sampai periode satu tahun 2023 dengan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD pada Tahun 2023.

Penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah, sebagai satu kesatuan dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Pembangunan Kerja Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Renja Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Renja Tahun 2023 Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Renja Tahun 2023 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan berdasarkan wilayah dan fungsi, serta ringkasan pendanaan yang memuat rincian urusan, program dan kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dana Alokasi Khusus serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penyusunan rancangan Renja 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal OPD sebagai instansi yang baru. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Perubahan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan urusan dan tupoksi sebagai berikut :

a. Urusan

1. Perumusan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;

3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
8. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan riil penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu antara lain pada :

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
- k. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang;
- m. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 050/9976/415.42/2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Renja PD Tahun 2023;

a. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan. Renja Tahun 2023 dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsinya sampai dengan periode tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

b. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- **BAB V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022 dengan mengacu pada APBD tahun 2021 dan 2022, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 16.878.921.702 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) dan realisasi anggaran mencapai Rp. 15.499.279.065 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 91,83%.

Dari Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun capaian pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah diarahkan untuk pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, untuk meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran dan evaluasi program Peningkatan Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan yang menunjang pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD tahun 2021 sebesar Rp. 11.628.500,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya Jumlah dokumen 3 (tiga) dokumen meliputi Renja, Renja Perubahan dan Renstra Perubahan.

Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 11.575.000,00 yang dipergunakan untuk Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat sebanyak 3 dokumen meliputi Renja, Renja Perubahan dan Renstra Perubahan.

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 99.54% yang dipergunakan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diarahkan untuk pemenuhan pelayanan yang menunjang pemenuhan dokumen evaluasi kinerja dan pelaporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD tahun 2021 sebesar Rp. 12.619.150,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sebanyak 5 (lima) laporan, Laporan Renja Triwulan I, II, IIIIV dan LKJiP.

Penyerapan anggaran sampai tribulan IV terealisasi sebesar Rp. 12.597.500,00 yang dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan yang menunjang pemenuhan dokumen evaluasi kinerja dan pelaporan pada Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat.

Capaian penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 99.83% yang dipergunakan untuk koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terdiri dari Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun 5 (lima) laporan, Laporan Renja Tribulan I, II, III, IV dan Dokumen LKJiP Tahun 2021.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah untuk pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu serta pemenuhan penyusunan laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN daerah diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD tahun 2021 sebesar Rp. 4.795.738.352 ,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah mewujudkan penyediaan gaji dan tunjangan selama 14 kali. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu sebesar 100 % Penyerapan anggaran sampai tribulan IV terealisasi sebesar Rp. 4.006.220.873,00 yang dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 14 kali.

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 83,54% yang dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan

daerah penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan keluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Kominfo yang difasilitasi sebesar 100%

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diarahkan untuk pemenuhan verifikasi keuangan SKPD sebanyak 11 kegiatan . Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 211.862.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa 11 kegiatan.

Penyerapan anggaran sampai triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 185.339.676,00. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 87.48%.

c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah penyediaan dokumen laporan keuangan tahunan SKPD.Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 5.627.500,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa dokumen laporan keuangan tahunan SKPD sebanyak 1 Dokumen.

Penyerapan anggaran sampai triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 5.592.900.00,00 yang dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah penyediaan dokumen laporan keuangan tahunan SKPD sejumlah 1 dokumen

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 99,39% yang dipergunakan untuk pemenuhan pelayanan administrasi keuangan daerah penyediaan dokumen laporan keuangan tahunan Dinas Kominfo yang difasilitasi sebesar 100%

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah diarahkan untuk pemenuhan kepegawaian perangkat daerah terkait kegiatan cukai yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- a. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan diarahkan untuk pemenuhan penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebanyak 450 orang.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 3.550.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebanyak 100%

Penyerapan anggaran sampai tribulan IV terealisasi sebesar Rp. 3.422.818.070,00 yang dipergunakan untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai :

- Di ds.Kwaron Kecamatan Diwek tgl.16 Maret 2021;
- Ds. Pandan blole Kec.Ploso tgl.17 Maret 2021;
- Ds.Bendet,Kec Diwek tgl.1 Sept 2021;
- Ds. Ngudirejo Kec Diwek ,tgl.2 Sept;
- Ds.Bawangan Kec Ploso tgl. 8 sept;
- Ds.Kebon Agung Kec Ploso tgl.9 Sept 2021;
- Kec.Ploso tgl.7 Oktober 2021;
- Kec Jombang tgl. 8 Oktober 2021.

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 96,42% yang dipergunakan untuk sosialisasi cukai sebanyak 450 orang.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah meliputi jumlah pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah meliputi jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD tahun 2021 sebesar Rp. 10.151.700,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi sebanyak 1 jenis. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 7.075.500,00.

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 69.70% yang dipergunakan untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan keluaran (output) jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Gedung Kominfo yang terfasilitasi sejumlah 3 lokasi.

b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah meliputi jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 32.115.000,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi sebanyak 3 lokasi. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 32.102.200,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 99,96% yang dipergunakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan keluaran (output) jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi pada 3 lokasi.

c. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi sebanyak 2 jenis.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. , 166.627.500,00 maka didapatkan keluaran (output) jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi sebanyak 2 jenis. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 142.678.821,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 85,63% yang dipergunakan untuk penyediaan bahan logistik kantor dengan keluaran (output) jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi sebanyak 2 jenis.

e. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi jumlah pemenuhan barang cetak dan jumlah pemenuhan barang penggandaan.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 34.342.900,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah pemenuhan barang cetak sebanyak 4 jenis dan dan Jumlah pemenuhan barang penggandaan sebanyak 1 jenis. Sedangkan hasil (outcome) yang

diharapkan adalah pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 34.340.000,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 99,99% yang dipergunakan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan keluaran (output) jumlah pemenuhan barang cetak 4 jenis dan jumlah pemenuhan barang penggandaan sejumlah 1 jenis.

f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi jumlah pemenuhan bahan bacaan.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 9.420.000,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah pemenuhan bahan bacaan sebanyak 3 media. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 9.350.000,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 99,26% yang dipergunakan untuk penyediaan barang bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan keluaran (output) jumlah pemenuhan bahan bacaan sebanyak 3 media.

g. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di arahkan untuk pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 27.883.000,00 maka didapatkan keluaran (output) Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 5 kali. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 22.699.948,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 81,41% yang dipergunakan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan keluaran (output) jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 5 kali.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi penyediaan jasa konsumsi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di arahkan untuk pemenuhan jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terfasilitasi.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 215.000.000,00 maka didapatkan keluaran (output) berupa jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terfasilitasi selama 12 bulan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 178.821.145,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 83,17% yang dipergunakan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan keluaran (output) jumlah kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terfasilitasi selama 12 bulan.

b. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di arahkan untuk pemenuhan jenis pelayanan umum.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.

220.613.600,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum sebanyak 5 jenis. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 219.514.650,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 99,50% yang dipergunakan untuk pemenuhan jenis pelayanan umum sebanyak 2 jenis.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi

jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 98.107.050,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara sebanyak 1 unit dan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya sebanyak 1 unit. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 71.310.630,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 97,69% yang berupa Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara sebanyak 1 unit dan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya sebanyak 1 unit.

- b. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 13.900.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 17 unit dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya sebanyak 17 unit. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 7.466.800,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 53,72% yang berupa jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 17 unit dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya sebanyak 17 unit.

- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang diarahkan untuk pemenuhan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah kantor dinas yang meliputi jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Peternakan yang dipelihara.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 29.577.500,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Kominfo yang dipelihara sebanyak 2 lokasi. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 29.457.000,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 99,59% yang berupa Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dinas Kominfo yang dipelihara sebanyak 2 lokasi di Gedung Kominfo dan Gedung Radio SJFM.

- d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diarahkan untuk pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang meliputi pelayanan pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan printer.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 198.185.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara yang dipelihara sebanyak 3 lokasi. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 181.208.000,00

Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 100% yang berupa Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara yang dipelihara sebanyak 3 lokasi.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diarahkan untuk pemenuhan bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik, dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

1). Kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah diarahkan untuk penyebaran informasi publik kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pengelolaan Media Komunikasi Publik diarahkan untuk penyebaran media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi melalui 5 media yang meliputi Inteligent Media Management (IMM), (2) Ikatan Layanan Masyarakat (ILM), (3) Warung Pojok (Warjok) lokal serta Bulaga, (4) Goes To School dan (5) Publikasi Media Elektronik dan kegiatan siaran radio perminggu melalui 7 program yang disiarkan melalui 104,1 FM Suara Jombang.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 812.991.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi sebanyak 5 media yang telah dilaksanakan yaitu :

- Dialoq Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal , tema : Vaksin Aman dan Halal ,Masyarakat Sehat, tanggal : 27 Januari 2021 dengan jumlah peserta 80 orang;
- Kominfo Goes to School, Di SMAN 2 Jombang ,tgl.11 Pebruari 2021, sebanyak 75 siswa; SMAN I Jombang ,tgl.15 Juni 2021 sebanyak 70 siswa;
- Dialoq Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal , tema : Kesiapan KPU untuk menghadapi pemilu serentak 2024, Di AULA Dinas Kominfo tgl. 26 Agustus 2021, sebanyak 80 orang;
- Dialoq Interaktif Warung Pojok Kebonrojo regional , tema : Gerakan Serentak Vaksinasi Masyarakat, Di ds.Sentul Kecamatan Tembelang,tgl. 9 September 2021, dengan Target 12.000 ribu orang pelaksanaan 2 hari;

- Kominfo Goes to School, Di SMP MUHAMMADIYAH I Jombang ,tgl.22 September 2021, sebanyak 75 siswa;
- Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal, Di AULA Dinas Kominfo tgl. 14 Oktober 2021, sebanyak 100 peserta;
- Dialog Interaktif Warung Pojok Kebonrojo Lokal, tema : "Antisipasi Dini Pecegahan Bencana alam ", sebanyak 100 orang

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik sebesar 3%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 776.491.000,00. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 95.51%

b. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

SubKegiatan Pelayanan Informasi Publik diarahkan untuk kegiatan PPID, Sosialisasi Lapor SP4N dan Sosialisasi serta Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesarRp.186.410.200,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID, Persentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti, dan jumlah desa yangterbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Sosialisasi SP4N Lapor Goes to Pesantren, di Pesantren Baitul Makmur Kec Wonosalam tgl.9 Pebruari 2021, sebanyak 100 orang;
- Pembinaan dan pelatihan KIM, di Ds.Kwaron Kec.Diwektanggal 23 Juni 2021 sebanyak 50 orang dan Ds.Menturus Kec Kudu tanggal 23 Juni 2021 sebanyak 50 orang;
- Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), di desa Japanan , Kec Gudo tgl. 27 Oktober 2021, sebanyak 50 orang; di desa Jombok , Kec Ngoro tgl. 28 Oktober 2021 sebanyak 50 orang ;

- Optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemkab Jombang, Ruang Suro Adiningrat, tgl. 18 Nopember 2021, sebanyak 85 orang.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik sebesar 3%. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 160.534.250,00. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 86.12%.

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

SubKegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas diarahkan untuk publikasi kegiatan pemerintah kabupaten Jombang dengan mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah, sosialisasi kegiatan pemerintah kabupaten Jombang melalui social media dan sosialisasi berupa Ngopi bareng pegiat Media Social.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 2.235.390.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah sebanyak 45 mitra kerjasama dan jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media social Instagram yang telah dilaksanakan yaitu :

- Ngopi bareng Pegiat Medsos, yang dilaksanakan di Di Pendopo Pemkab Jombang , tgl.25 Maret 2021, sebanyak 100 orang, dan di Pendopo Kab.Jombang , tgl 24 Nopember 2021, sebanyak 100 orang;
- Kerjasama dengan mitra kerjasama media cetak dan media online sebanyak 45 media;
- Jumlah pengikut akun Instagram @jombang_kab sebanyak 13.000 pengikut.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik sebesar 3%. Penyerapan anggaran

sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 2.200.917.203,00. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 98.46%.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diarahkan untuk pemenuhan bidang aplikasi informatika , dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

1). Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota diarahkan untuk fasilitasi koneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang, pemeliharaan jaringan intra dan penataan Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk penataan subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 17.280.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain sebanyak 43 subdomain.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebanyak 100% dan Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain sebanyak 67%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp.16.785.000,00. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 97.14%.

b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra diarahkan untuk penataan koneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah .

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 2.565.613.500,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah sebanyak 68 titik .

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebanyak 100% dan Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain sebanyak 67%. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 2.421.332.627,00. Capaian penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 94.38%.

2). Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk pengembangan Aplikasi yang terintegrasi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk penyusunan dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 55.793.550,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun sebanyak 4 dokumen yaitu : pembuatan kebijakan sesuai dengan Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 yaitu terkait kebijakan wajib 8 jenis yaitu kepegawaian, persuratan, pengaduan, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta momev. Maka kebijakan yang telah dilaksanakan meliputi 4 dokumen yaitu Perbup 15 Tahun 2021, SK Tim Koordinasi SPBE, Dokumen

Program Kerja dan SK Pembentukan Forum Data Satu Indonesia Kabupaten Jombang.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Aplikasi yang terintegrasi sebanyak 20% sesuai dengan target. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 54.732.500 atau 98.10%.

b. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah diarahkan untuk penataan koneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah .

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 335.481.000,00 maka didapatkan keluaran (output) Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar sebanyak 20% yaitu :

Pemenuhan Pusat Data

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
1	Pusat data aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan		√	
2	Perancangan dan pembangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan	√		
3	Penyediaan jalur supply utility dan logistik	√		
4	Penyediaan bandwidth untuk komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur	√		
5	Penyediaan sistem monitoring lingkungan pusat (temperatur, kelembapan, asap, kebakaran, kebocoroan air, dan tegangan listrik)	√		
6	Mempunyai dan menjalankan standar opsional prosedur untuk operasi dan perawatan	√		
7	Memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif		√	
8	Ruang masuk yang dipakai sebagai antar-muka antara sistem pengkabelan pusat data dan pengkabelan antar bangunan	√		
9	Lokasi untuk perangkat penyedia akses dan titik demarkai dan juga antar muka dengan sistem pengkabelan	√		

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
10	Area distribusi utama (lokasi main cross connect, router inti dan switches untuk infrastruktur LAN dan SAN)	√		
11	Area distribusi horizontal (lokasi distribusi untuk pengkabelan ke area distribusi perangkat)	√		
12	Area distribusi perangkat (ruang yang dialokasikan untuk perangkat akhir termasuk sistem komputer dan perangkat telekomunikasi)	√		
13	Area distribusi zona (terletak antara area distribusi horizontal dan area distribusi perangkat)	√		
14	Lokasi bangunan berada pada lokasi yang aman bencana alam dan mempunyai akses jalan yang cukup dan fasilitas parkir	√		
15	Bangunan ruang komputer tidak berada di bawah area perpipaan kecuali memiliki sistem pengendali air	√		
16	Jendela ruang komputer yang menghadap ke sinar matahari ditutup	√		
17	Memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani pengantaran barang/peralatan	√		
18	Memiliki sistem pengkondisian udara, proteksi kebakaran, kelistrikan yang sama dengan standar ruang komputer		√	
19	Kontrol akses memiliki pengamanan fisik disetiap jendela yang memungkinkan akses langsung ke pusat data	√		
20	Setiap sumber daya manusia di pusat data memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap keamanan fisik pusat data	√		
21	Pengamanan pusat data selama 24 jam dengan jumlah petugas paling sedikit 2 orang per shift		√	
22	Terdapat perangkat sistem pemantau visual yang berfungsi untuk memantau dan merekam	√		
23	Menggunakan sistem akses elektronik dan sistem pengawasan yang dikendalikan dengan mekanisme otentikasi	√		
24	Setiap tamu/pengunjung memiliki izin dan dilengkapi dengan tanda masuk serta tanda penhenal untuk dapat masuk		√	
25	Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	√		
26	Pintu darurat kebakaran harus dapat dibuka kearah luar	√		
27	Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
28	Lampu darurat, tanda keluar darurat, dan titik kumpul darurat diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
29	Dinding dan pintu ke ruang komputer, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan kawasan kritikal lainnya memiliki tingkat terbakar (fire-rating) sesuai dengan peraturan		√	
30	Ruang komputer diproteksi dengan sistem pemadam kebakaran dan deteksi asap		√	
31	Seluruh sistem deteksi asap bangunan diintegrasikan ke satu alarm bersama		√	
32	Sistem pemadam kebakaran otomatis diaktifkan secara manua		√	
33	Tersedia catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman untuk keperluan pemeriksaan		√	
34	Tersedia bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran		√	
35	Pemadam kebakaran ditempatkan sesuai ketentuan peraturan		√	
36	Semua tanda peringatan kebakaran ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan		√	
37	Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran didesain dan dipasang oleh petugas yang memiliki kualifikasi dan didesain sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional		√	
38	Bangunan dilengkapi dengan sistem proteksi petir		√	
39	Kabel daya masuk ke dalam bangunan dan diterminasi di ruang penyambungan listrik yang andal yang berisikan seluruh penyambungan dan pengukuran yang penting		√	
40	Daya yang tersedia dari penyedia listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak dimana pusat data berada		√	
41	Tersedia catu daya listrik alternatif (seperti generator) dengan kapasitas yang memadai untuk operasional pusat data paling sedikit 6 (enam) jam selama kejadian gangguan listrik utama		√	
42	Perangkat pusat data harus diproteksi dengan UPS atau catu daya cadangan lainnya		√	
43	Kapasitas penyimpanan energi UPS atau catu daya cadangan lainnya memadai untuk memasok beban pusat data sehingga cukup waktu bagi catu daya alternatif mencapai keadaan tunak (steady state) untuk memikul beban pusat data		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
44	Kapasitas UPS lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS		√	
45	UPS memiliki sistem pelaporan dan pemantauan kinerja serta sistem peringatan		√	
46	Ruang pusat data memiliki terminal pembumian (grounding) tembaga kurang dari 1 Ohm	√		
47	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan temperatur dengan suhu antara 18-24 °C	√		
48	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan kelembaban ruangnya dengan kelembaban antara 50-55%	√		
49	Peralatan pengkondisian udara dihubungkan ke catu daya utama dan didukung oleh catu daya alternatif		√	
50	Seluruh pengkabelan interior dengan tipe tidak mudah terbakar		√	
51	Setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas atau di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata secara baik antar rak	√		
52	Kabel daya satu fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 20 (dua puluh) cm	√		
53	Kabel daya tiga fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 60 (enam puluh) cm	√		
54	Kabel yang melewati dinding dilindungi terhadap bahaya api sesuai ketentuan peraturan		√	
55	Kabel tidak diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar rak		√	
56	Setiap kabel memiliki label identifikasi yang unik pada kedua ujung awal dan akhir		√	
57	Setiap rak peralatan memiliki label identifikasi		√	
58	Kabel input telekomunikasi eksternal dihubungkan di area atau ruang telekomunikasi tersendiri		√	
59	Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih sebelum ke ruang komputer		√	
60	Memiliki komponen kapasitas dasar dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
61	Memiliki tingkat availability 99,671%		√	
62	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 28,8 jam pertahun		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
63	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
64	Memiliki tingkat availability 99,749%		√	
65	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 22 jam pertahun		√	
66	Memiliki komponen kapasitas redundan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby).		√	
67	Memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegagalan, mengisolasi dampak kegagalan dan melakukan perawatan sehingga layanan pusat data tetap bekerja dengan baik		√	
68	Memiliki tingkat availability 99,982%		√	
69	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 1,6 jam pertahun		√	
70	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif.		√	
71	Memiliki tingkat availability 99.995%		√	
72	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 2.4 menit pertahun.		√	
73	Memastikan power management berjalan dengan baik		√	
74	Memastikan desain dan manajemen aliran udara dan sistem pendingin berjalan dengan baik		√	
75	Memastikan peralatan mekanik dan elektrik bekerja pada rentang optimum operasi baik dalam hal rentang daya dan rentang temperatur		√	
76	Menggunakan peralatan TIK dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan power density Pusat Data, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pengembangan Pusat Data ke depannya		√	
77	Mengintegrasikan kontrol optimasi manajemen energi pada seluruh peralatan TIK dan keseluruhan fasilitas Pusat Data		√	

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Aplikasi yang terintegrasi sebanyak 20% sesuai dengan target. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 314.423.000 atau 93.72%.

d. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik diarahkan untuk sistem elektronik dibangun/ dikembangkan yang sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 686.936.950.000,00 maka didapatkan keluaran (output) berupa sistem elektronik dibangun/ dikembangkan pada subkegiatan ini adalah terintegrasinya aplikasi e-sulash – SIPD, sidavid – NIK SIAK dan regmail – SIAP ASN.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Persentase Aplikasi yang terintegrasi sebanyak 20% sesuai dengan target. Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 652.733.280 atau 95.02%.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

1). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor diarahkan untuk penyusunan dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang melalui sub kegiatan :

a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor

Koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang diarahkan untuk rapat koordinasi dan pengolahan data.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 169.370.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa rapat koordinasi dan pengolahan data sebanyak 9 kali .

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang berupa pengumpulan Dokumen Infografis Data Sektoral, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik (I-PIKP). Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 163.876.500 atau 96.76%.

b. Subkegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Membangun Metadata Statistik Sektoral diarahkan untuk pemenuhan data statistik sektoral yang dikelola.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 76.426.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa data statistik sektoral yang dikelola sebanyak 28 data sektoral di portal satu data. Portal Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Untuk memudahkan OPD dalam menginput data, dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data. Dinas Kominfo pada saat ini telah membangun aplikasi Portal Satu Data dan MOU dengan BPS Jombang dalam kemudahan pemenuhan data statistik dengan data yang dikelola adalah 28 sektoral yang realisasinya tercapai sesuai dengan target.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang berupa pengumpulan Dokumen Infografis Data Sektoral, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP). Penyerapan anggaran sampai dengan tribulan IV mencapai Rp. 74.921.082 atau 98.03%.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan :

a. Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk sistem elektronik yang ada pada Kabupaten Jombang dilakukan pengamanan informasi.

Masukan (input) berupa tersedianya dana dari P-APBD sebesar Rp. 93.830.750,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa sistem elektronik yang sudah terverifikasi tanda tangan elektronik di BSSN. Pada tahun 2021 sistem elektronik yang ditargetkan yaitu SIRINDUNONA dan e-Office. Realisasi pada subkegiatan ini yaitu 100% sesuai dengan target.

Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah Target pada 2021 yaitu 50% sistem elektronik pada 2 aplikasi yaitu SIRINDUNONA dan e-Office. Realisasi pada kegiatan ini yaitu 100% sesuai dengan target. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV mencapai Rp. 82.363.910,00 atau 87.78%.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 20220	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun N-2 (2021)	Realisasi Renja tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Vapaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (5)
			K		K	K		K Rp	K
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	200%	N/A	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	200%	N/A	100 %	100%	100%	100%	100%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	6 dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	10 laporan	N/A	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	200%	N/A	100 %	100%	100%	100%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang di fasilitasi	28kali	N/A	14 kali	14 kali	100%	14 kali	14 kali
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan	22 kegiatan	N/A	11 kegiatan	11 kegiatan	100%	11 kegiatan	11 kegiatan
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang tersusun	2 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	200 %	N/A	100 %	100%	100%	100%
	1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penerima informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai	900 orang	N/A	450 orang	450 orang	100%	450 orang	450 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200 %	N/A	100 %	100%	100%	100%
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	6 lokasi	N/A	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi

--	--

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20220	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Tahun N-2 (2021)	Realisasi Renja tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Vapaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (5)
				K		K	K		K Rp	K
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	6 lokasi	N/A	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	4 jenis	N/A	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	8 jenis	N/A	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis
			Jumlah pemenuhan barang penggandaan	2 jenis	N/A	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	6 media	N/A	3 media	3 media	100%	3 media	3 media
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 kali	N/A	3 kali	3 kali	100%	3 kali	3 kali
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	200 %	N/A	100 kali	100 %	100%	100%	100%
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terfasilitasi	6 lokasi	N/A	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	10 jenis	N/A	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	200 %	N/A	100 %	100 %	100%	100%	100%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 unit	N/A	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit
			Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	2 unit	N/A	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	34 unit	N/A	17 unit	17 unit	100%	17 unit	17 unit 7%
			Jumlah kendaraan dinas/operasional dibayarkan pajaknya	34 unit	N/A	17 unit	17 unit	100%	17 unit	17 unit
	3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	4 lokasi	N/A	2 lokasi	2 lokasi	100%	2 lokasi	2 lokasi 18%
	4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasara gedung kantor yang dipelihara	6 lokasi	N/A	3 lokasi	3 lokasi	100%	3 lokasi	3 lokasi 44%

--	--

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20220	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun N-2 (2021)	Realisasi Renja tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Vapaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (5)
			K		K	K		K Rp	K
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	123 I-PIKP	N/A	81,6 (sedang)	62 (sedang)	100%	81,6	81,6 54%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	168 IKM	N/A	85,81 baik	84,5 (baik)	100%	85,81	85,81
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	200 %	N/A	100 %	100%	100	100 54%
	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi	10 media	N/A	5 media	100%	5	5 52%
			Jumlah program siaran radio per minggu	14 program	N/A	7 program	100%	7	7
	2	Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti sesuai SOP PPID	200 %	N/A	100 %	100%	100	100 41%
			Prosentase pengaduan di SP4N LAPOR yang ditindaklanjuti	200 %	N/A	100 %	100%	100	100
			Jumlah desa yang terbentuk KIM baru dan dilaksanakan pembinaan	10 desa	N/A	5 desa	100%	5 desa	5 desa
	3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah mitra kerjasama media cetak dan elektronik informasi pembangunan daerah	90 mitra kerjasama	N/A	45 mitra kerjasama	100%	45 mitra kerjasama	45 mitra kerjasama 56%
			Jumlah pengikut akun resmi pemerintah daerah di media sosial	25,000 pengikut	N/A	12,000 pengikut	100%	12.000 pengikut	12.000 pengikut
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 4 indikator terkelola	N/A	2 Level	2 level	100%	level 2	level 2 39%
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)	36 indikator terkelola	N/A	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	100%	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	200 %	N/A	100 %	100%	100%	100% 40%
			Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	167 %	N/A	67 %	100%	67%	67%

--	--

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20220	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Tahun N-2 (2021)	Realisasi Renja tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Vapaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (5)
				K		K	K		K Rp	K
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah subdomain sesuai standar penyelenggaraan subdomain	107 subdomain	N/A	43 Subdomain	43 subdomain	100%	43 sub domain	43 sub domain 26%
	2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah terkoneksi jaringan intra sesuai standar penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah	136 titik	N/A	68 titik	68 titik	100%	68	68 40%
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Aplikasi yang terintegrasi	40 %	N/A	20 %	20 %	100%	25	25 37%
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan SPBE pada aspek TIK yang disusun	6 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen 17%
	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pusat data sesuai standar	45 %	N/A	25 %	25 %	100%	20%	20% 37%
	3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem elektronik dibangun/ dikembangkan	9 aplikasi	N/A	4 aplikasi	4 aplikasi	100%	5 aplikasi	5 aplikasi 40%
Urusan Statistik										
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	200 %	N/A	100 %	100 %	100%	100%	100% 30%
			Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	7 (baik) IPP	N/A	3,164 IPP	3,52 IPP	100%	3,164	3,164
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	6 dokumen	N/A	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen 30%
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi pengumpulan dan pengolahan data sektoral Kabupaten Jombang	18 kali	N/A	9 kali	9 kali	100%	9 kali	9 kali 29%
	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	56 data sektoral	N/A	28 data sektoral	28 data sektoral	100%	28 data sektoral	28 data sektoral 33%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	75 %	N/A	50 %	50 %	100%	50%	50% 22%
	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi		Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	75 %	N/A	50 %	50 %	100%	50%	50% 22%
	1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengamanan informasi	5 sistem elektronik	N/A	2 sistem elektronik	2 sistem elektronik	100%	3 sistem elektronik	3 sistem elektronik 22%

--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam IKK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang tahun 2021, pelaksanaan indikator kinerja disesuaikan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tupoksi sebagai berikut :

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
 - Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang terhubung dengan akses internet dan akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 61 OPD. Jaringan Intra Pemerintah Daerah menggunakan koneksi Fiber Optic (FO).
 - Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
Persentase Jumlah OPD di Kabupaten Jombang yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% meliputi 61 OPD. Desa dan Kecamatan menggunakan jaringan wireless. Bandwidth sebesar 600 MB untuk client, 200 MB untuk server, dan 200 MB
 - Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.
Penyediaan bandwidth yang cukup untuk OPD yang bisa digunakan untuk akses internet, berbasis suara, video, teks data dan sinyal
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
 - Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015

Layanan public di Pemkab Jombang yang dimanfaatkan secara daring meliputi sebagai berikut :

- 1 Urus KTP dukcapil.jombangkab.go.id
 - 2 SIRINDUNONA perizinan.jombangkab.go.id
 - 3 Pendaftaran Online RSUD Jombang rsudjombang.jombangkab.go.id
- Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar

18 OPD yang memiliki web sesuai standart x 100% = 29.5%
61 OPD yang ada di Kabupaten Jombang

Saat ini situs web OPD di Kabupaten Jombang dengan subdomain namaopd.jombangkab.go.id dimiliki 18 OPD dari 61 OPD yaitu (1) bkd.jombangkab.go.id, (2) bapenda.jombangkab.go.id, (3) bappeda.jombangkab.go.id, (4) bpbd.jombangkab.go.id, (5) dpm-ptsp.jombangkab.go.id, (6) kominfo.jombangkab.go.id, (7) pertanian.jombangkab.go.id, (8) disdagrin.jombangkab.go.id, (9) disnaker.jombangkab.go.id, (10) pupr.jombangkab.go.id, (11) dlh.jombangkab.go.id, (12) dukcapil.jombangkab.go.id, (13) dinkes.jombangkab.go.id, (14) inspektorat.jombangkab.go.id, (15) rsudjombang.jombangkab.go.id, (16) plososibaja.jombangkab.go.id, (17) jdih.jombangkab.go.id, (18) sibaja.jombangkab.go.id.

OPD yang belum memiliki website sesuai dengan penamaan domain sesuai dengan PERMEN no 28 Tahun 2006 tentang domain go.id difasilitasi dalam portal website Pemkab Jombang dengan alamat www.jombangkab.go.id. Halaman website jombangkab memiliki halaman utama, terdapat pula subpage 61 OPD yang dikelola oleh masing-masing OPD Kabupaten Jombang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Aplikasi umum dan khusus SIMDA integrated telah digunakan oleh 61 OPD sehingga tercapai 100%.

- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

20 layanan publik & administrasi pemerintahan x 100% = 55.56%
36 indikator dokumen SPBE

Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan tercapai 55,56%. Layanan SPBE yang tercantum sebagai berikut :

**REKAPITULASI DATA LAYANAN PUBLIK DAN
LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SESUAI DOKUMEN PROSES BISNIS
TAHUN 2021**

No.	Aplikasi Fungsional	Ada/ Tidak Ada	Nama Aplikasi	Unit Kerja/Perangkat Daerah Pengelola
1	2	3	4	5
I	LAYANAN PUBLIK			
1	Sistem Informasi Tenaga Kerja	Tidak Ada	-	-
2	Sistem Informasi Pendidikan	Tidak Ada	-	-
3	Sistem Informasi Kepemudaan	Tidak Ada	-	-
4	Sistem Informasi Kesehatan	Ada	SIMPUS	Dinas Kesehatan
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	Ada	SIM-PMKS	Dinas Sosial
6	Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Ada	Website Blonjo	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Sistem Informasi Perindag	Ada	e-Katalog Harga Pangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	Sistem Informasi EXIM	Tidak Ada	-	-
9	Sistem Informasi Pertanian	Ada	Adaptif dan Simfoni	Dinas Pertanian

10	Sistem Informasi Peternakan	Tidak Ada	-	-
11	Sistem Informasi erkebunan	Tidak Ada	-	-
12	Sistem Informasi Perikanan	Tidak Ada	-	-
13	Sistem Informasi Kehutanan	Tidak Ada	-	-
14	Sistem Informasi Tanam Pangan	Tidak Ada	-	-
15	Sistem Informasi Wisata dan Budaya	Ada	Jombang Travel	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16	Sistem Informasi Investasi	Tidak Ada	-	-
17	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Ada	SIPPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	Sistem Informasi Pendayagunaan Air	Tidak Ada	-	-
19	Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ada	NOC	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan	Ada	Sistem Informasi Aset Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Sistem Informasi Energi Terbarukan	Tidak Ada	-	-
22	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Tidak Ada	-	-
II	Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	Ada	SIMDA Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	SIMDA Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Sistem Informasi Pengadaan	Ada	LPSE, SIBAJA	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Sistem Informasi Pembangunan	Ada	SIPPEM	Bagian Administrasi Pembangunan
5	Sistem Informasi Legislasi	Tidak Ada	-	-

6	Sistem Informasi Kearsipan	Tidak Ada	-	-
7	Sistem Informasi Kebencanaan	Ada	Sistem Pelaporan Kejadian Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Sistem Informasi Pengawasan	Ada	SIMHPI	INSPEKTORAT
III Administrasi Legislasi				
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	Ada	JDIH	Bagian Hukum
2	Sistem Informasi Legislatif	Tidak Ada	-	-
IV Manajemen Keuangan				
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	Ada	SIMDA Integrated	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
V Sistem Informasi Keuangan Daerah				
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
VI Manajemen Kepegawaian				
1	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada	SIAP ASN	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Jenis Layanan		36		
Layanan Tersedia		20		

- Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik

$$18/20 \times 100\% = 90\%$$

**DATA LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
YANG SUDAH MEMANFAATKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
TAHUN 2021**

No.	Aplikasi Fungsional	Sudah/ Belum	Nama Aplikasi	Unit Kerja/ Perangkat Daerah Pengelola
1	2		4	5
1	Sistem Informasi Kesehatan	Sudah	SIMPUS	Dinas Kesehatan
2	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	Sudah	SIM-PMKS	Dinas Sosial
3	Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Sudah	Website Blonjo	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4	Sistem Informasi Perindag	Sudah	e-Katalog Harga Pangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Sistem Informasi Pertanian	Sudah	Adaptif dan Simfoni	Dinas Pertanian
6	Sistem Informasi Wisata dan Budaya	Sudah	Jombang Travel	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
7	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Sudah	SIPPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah	NOC	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan	Sudah	Sistem Informasi Aset Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	Belum	SIMDA Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
11	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Belum	SIMDA Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12	Sistem Informasi Pengadaan	Sudah	LPSE, SIBAJA	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
13	Sistem Informasi Pembangunan	Sudah	SIPPEM	Bagian Administrasi Pembangunan
14	Sistem Informasi Kebencanaan	Sudah	Sistem Pelaporan Kejadian Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Sistem Informasi Pengawasan	Sudah	SIMHPI	INSPEKTORAT
16	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	Sudah	JDIH	Bagian Hukum

17	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Sudah	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	Sudah	SIMDA Integrated	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Sudah	SIMDA Integrated	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Sistem Informasi Kepegawaian	Sudah	SIAP ASN	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Layanan Tersedia		20		
Layanan yang sudah menggunakan Sertifikat Elektronik		18		

- Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belum tersedia sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

Aplikasi yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah yaitu 100% sebagai berikut:

1. Aplikasi “Urus KTP”

“Urus KTP” merupakan inovasi terhadap pelayanan pencetakan KTP elektronik bagi Masyarakat Jombang. Dengan adanya aplikasi "Urus KTP Jombang" yang dapat diunduh di google playstore diharapkan memudahkan penduduk jombang untuk melakukan pengurusan KTP elektronik. Penduduk hanya akan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kecamatan yang ditunjuk pada saat mengambil KTP elektronik tersebut.

Aplikasi ini terhubung dengan data penduduk dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)

2. Aplikasi “SiRinduNona”

Sistem Perizinan Terpadu Non Berusaha (SiRinduNona) merupakan aplikasi yang ditujukan untuk masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perijinan non berusaha seperti Surat Izin Praktek (SIP) untuk tenaga kesehatan agar tidak perlu datang dan antri di kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Masyarakat cukup mengunjungi laman <https://perizinan.jombangkab.go.id/> untuk mendapatkan Surat yang dikehendaki. Aplikasi SiRinduNona terhubung dengan data penduduk dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan online.

3. Aplikasi “Pendaftaran Online RSUD Jombang”

Aplikasi Pendaftaran Online RSUD Jombang merupakan fasilitas yang diberikan oleh RSUD Jombang kepada masyarakat yang akan berobat ke poliklinik RSUD yang semula harus mengantri untuk mendaftar di loket pendaftaran, kini cukup melakukan pendaftaran melalui laman <https://rsudjombang.jombangkab.go.id/> untuk mendapatkan nomer antrian di poliklinik yang dituju.

Aplikasi “Pendaftaran Online RSUD Jombang” terhubung dengan data penduduk dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) serta terhubung dengan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

- Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
Belum ada perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah, dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang belum memiliki pusat data (data center).
- Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)

$$\frac{31}{61} \times 100\% = 50,82\%$$

**DAFTAR SIKLUS PEMBARUAN DATA
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD)**

TAHUN 2021

NO	INSTANSI	SIKLUS PEMBARUAN DATA	NAMA APLIKASI
1	2	3	4
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3 Bulan	Aplikasi SIAP ASN
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 Bulan	Aplikasi SISMIOP, Aplikasi BPHTB
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 Bulan	SIMDA Keuangan, SIMDA Aset, SIMDA Gaji
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6 Bulan	SIPD, Website Berkadang, Website SRA, Website Sinergitas, Website e-Litbang, Aplikasi KRISNA
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Bulan	Sistem Pantauan Hujan, Sistem Pelaporan Kejadian Bencana
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6 Bulan	SIRINDUNONA
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Bulan	JASNITA, Mail Jombangkab, Cloud Jombangkab, Sensus ASN, Website Sigap COVID-19
8	DINAS PERHUBUNGAN	3 Bulan	ATCS, SIKIR ONLINE, SIMOLEN, SIMLLAJ, SIDPJ
9	DINAS PERTANIAN	6 Bulan	Website ADAPTIF, Website SIMFONI
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1 Bulan	E-Katalog Harga Bahan Pokok, Sistem Layanan Tera dan Tera Ulang
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	3 Bulan	Aplikasi Belanja Online UMKM

12	DINAS PEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3 Bulan	Aplikasi Jombang Travel
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Tahun	PPDBSMP, PPDBSD
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 Bulan	SISKEUDES
15	DINAS SOSIAL	3 Bulan	SIM-PMKS
16	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 Bulan	Sistem Informasi Aset Tanah
17	DONAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6 Bulan	SIM Pelaporan
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Bulan	Layanan Permohonan SPPL Online
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 Bulan	e-Pusda
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1 Bulan	SIK, SIKS MANIS, UrusKTP
21	DINAS KESEHATAN	1 Bulan	SIMPUS
22	INSPEKTORAT	1 Bulan	E-AUDIT, SIMHPI, Whistle Blowing System
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG	1 Bulan	Pendaftaran Online
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO	3 Bulan	ArGon
25	KECAMATAN PETERONGAN	6 Bulan	Aplikasi SITAHU-TERONG
26	BAGIAN ORGANISASI	1 Bulan	e-TPP, SIAA, e-SAKIP
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6 Bulan	SIPPEM (e-MONEV)

28	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1 Tahun	Website Sepakat
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	3 Bulan	Aplikasi Pendataan UMKM
30	BAGIAN HUKUM	1 Bulan	Website JDIH
31	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1 Bulan	LPSE, SIBAJA, SIRUP
JUMLAH OPD		31	

- $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

DAFTAR DATA BERBAGI PAKAI
KABUPATEN JOMBANG
Tahun 2022

NAMA DATA	OPD Pengguna Data
Data Kependudukan	Dinas Sosial, DPM-PTSP, RSUD Jombang
Data ASN	Bagian Organisasi

- Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city

$$\frac{31}{61} \times 100\% = 50,82\%$$

**REKAPITULASI DATA INOVASI PENDUKUNG SMART CITY PADA
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (OPD)
TAHUN 2021**

NO	INSTANSI	NAMA INOVASI
1	2	3

1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Aplikasi SIAP ASN
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Aplikasi SISMIOP, Aplikasi BPHTB
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SIMDA Keuangan, SIMDA Aset, SIMDA Gaji
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SIPD, Website Berkadang, Website SRA, Website Sinergitas, Website e-Litbang, Aplikasi KRISNA
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sistem Pantauan Hujan, Sistem Pelaporan Kejadian Bencana
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SIRINDUNONA
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JASNITA, Mail Jombangkab, Cloud Jombangkab, Sensus ASN, Website Sigap COVID-19
8	DINAS PERHUBUNGAN	ATCS, SIKIR ONLINE, SIMOLEN, SIMLLAJ, SIDPJ
9	DINAS PERTANIAN	Website ADAPTIF, Website SIMFONI
10	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	E-Katalog Harga Bahan Pokok, Sistem Layanan Tera dan Tera Ulang
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Aplikasi Belanja Online UMKM
12	DINAS PEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Aplikasi Jombang Travel
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPDBSMP, PPDBSD
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SISKEUDES
15	DINAS SOSIAL	SIM-PMKS
16	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sistem Informasi Aset Tanah

17	DONAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SIM Pelaporan
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Layanan Permohonan SPPL Online
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	e-Pusda
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	SIAK, SISCA MANIS, UrusKTP
21	DINAS KESEHATAN	SIMPUS
22	INSPEKTORAT	E-AUDIT, SIMHPI, Whistle Blowing System
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOMBANG	Pendaftaran Online
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO	ArGon
25	KECAMATAN PETERONGAN	Aplikasi SITAHU-TERONG
26	BAGIAN ORGANISASI	e-TPP, SIAA, e-SAKIP
27	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SIPPEM (e-MONEV)
28	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Website Sepakat
29	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Aplikasi Pendataan UMKM
30	BAGIAN HUKUM	Website JDIH
31	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	LPSE, SIBAJA, SIRUP
JUMLAH OPD		31

- Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo

$$1/3 \times 100\% = 33,33\%$$

DATA ASN TENAGA PENGELOLA TIK TAHUN 2021
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

NAMA	NIP	KETERANGAN
NUR FATIH , S.Kom	19890725 201505 2 001	Sertifikasi
FIRLANA NURDIANSYAH , S.Kom	19830225 201101 1 004	Belum Sertifikasi
LAVANNA INDANUS RAMADHAN, S.Kom.	19960130 201903 1 003	Belum Sertifikasi

- Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.

Implementasi e-government tertuang dalam dokumen Masterplan SmartCity, Arsitektur SPBE dan Analisis Strategis SmartCity.

3. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota

**REKAPITULASI KOMUNITAS MASYARAKAT/ MITRA STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2021**

NO	NAMA KOMUNITAS	STATUS	KETERANGAN
1	PWI Kabupaten Jombang	AKTIF	Persatuan Wartawan Indonesia
2	Jombang Travel	AKTIF	Komunitas Pegiat Pariwisata di Kab. Jombang
3	UKM Jombang	AKTIF	Komunitas UMKM di Kab. Jombang
4	KIM Desa Menturus, Kudu	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa

			Menturus Kecamatan Kudu
5	KIM Desa Plandaan, Plandaan	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Plandaan Kecamatan Plandaan
6	KIM Desa Temuwulan, Perak	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Temuwulan Kecamatan Perak
7	KIM Desa Bawangan, Ploso	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Bawangan Kecamatan Ploso
8	KIM Desa Pulosari, Bareng	AKTIF	Kelompok Informasi Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng
JUMLAH		8	8

- **Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)**

Jumlah program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dengan strategi komunikasi (STRAKOM)

----- x 100%

Jumlah program dan kebijakan STRAKOM yang dipublikasikan

107 jumlah program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota

dengan strategi komunikasi (STRAKOM) x 100%

107 jumlah program dan kebijakan STRAKOM yang dipublikasikan

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui portal resmi Jombangkab.

**REKAPITULASI KONTEN INFORMASI
PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

NO	BULAN	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
1	Januari	18	Website https://jombangkab.go.id/

2	Februari	11	Website https://jombangkab.go.id/
3	Maret	13	Website https://jombangkab.go.id/
4	April	5	Website https://jombangkab.go.id/
5	Mei	3	Website https://jombangkab.go.id/
6	Juni	20	Website https://jombangkab.go.id/
7	Juli	41	Website https://jombangkab.go.id/
8	Agustus	35	Website https://jombangkab.go.id/
9	September	33	Website https://jombangkab.go.id/
10	Oktober	33	Website https://jombangkab.go.id/
11	November	30	Website https://jombangkab.go.id/
12	Desember	30	Website https://jombangkab.go.id/
JUMLAH		272	

- **Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**

Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
 ----- x 100%
 Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dipublikasikan

107 jumlah diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah

$$\frac{\text{ditetapkan} \dots\dots\dots}{100\%} \times 100\% =$$

$$\frac{107 \text{ jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dipublikasikan}}{100\%} \times 100\% =$$

Program dan kebijakan pemerintah dipublikasikan melalui website JDIH dan portal resmi Jombangkab.

REKAPITULASI KEGIATAN DISEMINASI DAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH	MEDIA PUBLIKASI
1	Publikasi Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	106	Website https://jdih.jombangkab.go.id/
2	Permintaan Informasi melalui PPID	1	Website https://ppid.jombangkab.go.id/
JUMLAH		107	

- Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah**

Belum ada perangkat daerah yang menyimpan pusat data pemerintah, dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang belum memiliki pusat data (data center).

STATISTIK

Outcome :

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Rumus penilaian :

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

28.083 peserta dengan sasaran penyebaran informasi publik x 100% = 3%

935.692 jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Jombang

Penyebaran informasi publik dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melalui sosialisasi ke masyarakat sebagai berikut :

DATA PELAKSANAAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG

NO	URAIAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Bidang Cukai	1. Desa Jarak, Kec. Wonosalam 2. Desa Karangpakis, Kec. Kabuh	300 orang peserta
2	Warung Pojok (WARJOK) Lokal dan Regional	Dilaksanakan sebanyak 3 kali Warjok Lokal dan 2 Kali Warjok Regional	1200 orang peserta
3	Sosialisasi Lapor SP4N	Jl. KH. Wahid Hasyim 133 (Car Free Day)	150 orang peserta
4	Sosialisasi dan Evaluasi SPBE	Dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan	75 orang peserta
5	Sosialisasi Desain Grafis dan Fotografi untuk UKM	Aula Besut Dinas Kominfo	120 orang peserta
6	Sosialisasi Pengelolaan Website Desa	Ruang Bung Tomo dan Ruang Soero Adiningrat	306 orang peserta
7	Sosialisasi Subdomain, Hosting dan Mail	Ruang Soero Adiningrat	103 orang peserta
8	Pengikut di Instagram @jombang_kab	Instagram	11.800 <i>followers</i>
9	<i>Subscriber</i> di Facebook Kabupaten Jombang	Facebook	4.999 <i>subscribers</i>
10	<i>Subscriber</i> di Youtube Jombangkab TV	Youtube	571 <i>subscribers</i>
11	Jangkauan Siaran Radio SJFM di 21 Kecamatan	Frekuensi 104.1 FM	7.650 pendengar

		dan streaming radio online	
12	Seminar Daring <i>Zoom Meeting</i> tentang Vaksinasi	Radio SJFM dan Youtube	809 peserta
TOTAL			28.083 orang

PERSANDIAN

Output

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Jumlah nilai per area keamanan informasi
 ----- x 100%
 Jumlah area penilaian

$$\frac{158}{645} \times 100\% = 24,50\%$$

Hasil evaluasi telah dijabarkan dalam Buku **Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2021** yang telah diserahkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, adapun hasil evaluasi akhir seperti yang tercantum dalam Buku Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi di Kabupaten Jombang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Keamanan Informasi

KATEGORI	SKOR	SKOR MAKSIMAL	TINGKAT KEMATANGAN
Tata Kelola	19	126	I +
Pengelolaan Resiko	17	72	I
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	32	159	I +
Pengelolaan Aset	51	168	I +
Teknologi dan Keamanan Informasi	39	120	II
JUMLAH SKOR	158	645	Tidak Layak

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan informasi infrastruktur teknologi informasi dan ruang server pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Jombang masuk dalam tingkat kematangan “TIDAK LAYAK” dengan skor perolehan 158 dari total skor 645.

Outcome :

- **Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.**

Belum ada kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal, dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang pengamanan kegiatan strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

- **Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.**

Belum ada sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian, dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang penerapan SMKI di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

- **Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah**

Jumlah nilai per area keamanan informasi	
-----	x 100%
Jumlah area penilaian	
$\frac{21}{58} \times 100\% = 36,21\%$	

- **Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan.**

Belum ada titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS), penetapan titik pada pemerintahan daerah yang harus diamankan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SMP/standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Realisasi Renstra PD			Target Renstra		Ket
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	'-	'-	N/A	N/A	100%	100%	100%	
2	Indeks Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik (I-PIKP)	'-	'-	N/A	N/A	81,6	62	63	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	'-	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	N/A	N/A	85,81	84	84,5	
4	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	'-	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	N/A	N/A	Level 2	Level 2	Level 2	
5	Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	'-	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	N/A	N/A	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	8 indikator terkelola	

--	--

No	Indikator	SMP/standar Nasional	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra		Ket
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	-	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	
7	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	N/A	N/A	3.164	3,52	3,53	
8	Persentase Sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	-	Tingkat Keamanan Informasi pemerintah	N/A	N/A	50%	75%	100%	

--	--

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil revidi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah berlangsung cukup baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai mediator masyarakat dengan aparatur dalam penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam penyelenggara penyampaian informasi di pemerintah daerah di berbagai wilayah dituntut untuk lebih produktif, rasional dan mengikuti perkembangan yang ada serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang krusial dalam rangka pengembangan penyampaian informasi, diantaranya :

Form Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
1	2	3	4
Terbatasnya Informasi Publik yang diterima masyarakat	Keterbatasan Akses Informasi yang diterima oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik dan berkualitas Masih kurangnya kesadaran OPD untuk memberikan informasi pada publik Pembinaan Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) yang belum optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemerintahan yang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan isu tuntutan penciptaan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
Masih Rendahnya Pemanfaatan Aplikasi OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Sistem Aplikasi yang dibangun OPD sulit untuk diintegrasikan Belum optimalnya pembangunan / penyediaan jaringan internet dalam rangka meningkatkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik Pada saat pembuatan aplikasi tidak berkoordinasi dengan Dinas Kominfo	Indeks SPBE	Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan yang integratif
Masih rendahnya Indeks SPBE	Komitmen OPD di Lingkungan Pemkab masih		

	kurang khususnya dalam Pelaksanaan SPBE		
	Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal		
Masih rendahnya Indeks Keamanan Informasi	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi		
	Terbatasnya Tenaga Teknis Untuk Pengamanan Informasi		
	Antrian penanganan sertifikat elektronik di BSSN	Indeks KAMI BSSN	
Kesulitan pengumpulan data sektoral yang ada pada OPD	OPD menunda/ tidak mengirim data sektoral yang diminta		
Inkonsistensi data	Metodologi yang digunakan dan jangka waktu yang dipakai		
	Keterbatasan SDM yang baik dari segi jumlah maupun pengetahuan	Portal Satu Data Kabupaten Jombang	
Belum ada standarisasi data dan kualitas analisis data yang belum terjamin	terdapat kesenjangan data antara yang dibutuhkan dengan data yang tersedia		
	perubahan alur pengumpulan data sektoral		

Usaha penanggulangan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah:

- Pengembangan aplikasi teknologi dan informasi guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, biaya, dan administrasi. Memberikan informasi kepada masyarakat melalui *e-government* tanpa harus datang ke kantor dengan memberikan layanan media komunikasi elektronik selain di website juga melalui android dan IOS.
- Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Pelatihan untuk pegawai dalam bidang keilmuan komunikasi dan Informatika

- Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dalam memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat.

Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2023 Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem aplikasi dalam menerapkan E-Government.
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.
4. Kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat.
5. Jaminan keamanan sistem TIK.

Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dari Kemenkominfo RI tentang TIK.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
3. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
4. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
5. Penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Penerapan fungsi GPR (government public relations).
7. Edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.

9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang tahun 2023 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11,760,071,639	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12,753,943,859	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,138,905,339	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,209,650,439	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13,437,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27,560,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,730,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,060,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4,707,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	16,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,103,023,704	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,141,765,824	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4,831,480,104	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4,927,422,324	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	266,786,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	209,586,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,757,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,757,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				259,010,535	Administrasi Umum Perangkat Daerah				373,430,685	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket `Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13,805,635	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13,805,635	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	51,247,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	65,246,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	82,945,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	164,383,900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	51,727,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	51,753,750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11,496,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11,496,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	47,789,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	66,765,400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				543,434,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				535,589,800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	251,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	251,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	292,434,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	284,589,800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kantor yang Disediakan								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219,999,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227,289,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42,110,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42,110,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	17 Unit	78,150,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	17 Unit	86,550,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,199,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,199,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 Unit	49,540,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	63 Unit	48,430,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1,983,381,200	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2,237,677,550	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,983,381,200	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2,237,677,550	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen	375,502,500	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 dokumen	375,502,500	
	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 dokumen	140,478,700	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 dokumen	160,779,008	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	45 dokumen	1,362,621,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	45 dokumen	1,596,686,000	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 unit	104,779,000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 unit	104,710,042	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3,637,785,100	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				4,210,611,000	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,968,740,000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,951,160,000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16,500,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	16,300,000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	68 Unit	1,952,240,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	68 Unit	2,537,938,000	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,669,045,100	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,659,445,000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	211,611,100	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	211,306,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	785,588,000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	784,941,000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	671,846,000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	660,125,2000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				345,315,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				331,450,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				345,315,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				331,450,000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				345,315,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				331,450,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	245,069,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	231,204,000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28 Dokumen	100,246,000	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28 Dokumen	100,246,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				135,938,900	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				135,938,900	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				135,938,900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				135,938,900	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				135,938,900	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				135,938,900	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	135,938,900	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	135,938,900	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan kegiatan dilakukan dari bawah dimulai dari Musrenbang tingkat Desa dilanjutkan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam prosesnya usulan dari desa diakomodir di tingkat kecamatan dan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing SKPD yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan. Hasil Musrenbang pada Dinas Kominfo Untuk tahun 2023 tidak ada usulan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai hubungan nasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah. Sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN 2020-2024 VISI : ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Visi dan Misi Kemenkominfo selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, meliputi :

1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominformasi Provinsi Jawa Timur;
2. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebaran informasi dan pelayanan hubungan komunikasi;

3. Mengoptimalkan regulasi Pengembangan dan Pemanfaatan Smart Province oleh Perangkat Daerah;
4. Mengoptimalkan Pemenuhan Ketersediaan Data Statistik Sektor yang akurat, akuntabel dan terpercaya;
5. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov. Jawa Timur.

VISI Dinas Kominfo Prov. Jawa Timur yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong" dan MISI 3 yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"

Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dengan mengacu misi ke tiga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan"

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, implikasi rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis dapat teridentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Menyebarluaskan informasi dengan memanfaatkan TIK;
2. Mengelola Isu Publik melalui Monitoring Media
3. Mengimplementasikan e-Government / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Pengintegrasian Data Di Seluruh OPD
5. Mewujudkan Satu Data di Jawa Timur

Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam rangka mendukung program-program Bupati Kabupaten Jombang, Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada visi dan misi Bupati terpilih.

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan dan menyangkut arah pelaksanaan organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten,antisipasi dan produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh penyelenggara pemerintah. Visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang harus dicapai dalam tahun 2023, untuk itu RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah merupakan penjabaran dan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta RPJM Nasional. Adapun visi Kabupaten Jombang adalah **“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Jombang tersebut maka ada 3 misi yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
2. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

Dari semua 3 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kabupaten Jombang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu misi – 1 yaitu Mewujudkan Tata kelola Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

Berdasarkan 3 misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan visi untuk periode tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

- *Penyebaran Informasi* memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merupakan institusi yang merumuskan, menyusun, memonitoring, mengevaluasi serta memiliki wewenang untuk menyebarluaskan informasi

pembangunan serta kegiatan daerah.

- *Pelayanan publik (public service)* memiliki maksud bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika harus mampu memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat yang harus di utamakan dan di penuhi adalah kebutuhan akan keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi.

Misi adalah merupakan fondasi penyusunan rencana strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi (pelaksana) pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap Instansi Pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna mendapatkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kominfo Kabupaten Jombang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja Dinas Kominfo Tahun 2023 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kominfo serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Renja Tahun 2023 Dinas Kominfo yaitu Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika dan Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE.

Sasaran kinerja Dinas Kominfo yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Perhitungan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 FORM TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2018-2023

Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran (IKD)	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Tahun			Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Targe Tahun		
				1	2	3			1	2	3
1	2	3	4	5			6	7	8		
Meningkatkan kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Publik bidang Komunikasi dan Informatika	7,69	7,69	7,69	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	83,5	84	84,5
								Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,51	3,52	3,53
Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	8 indikator terkelola	Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	18 indikator terkelola	18 indikator terkelola	8 indikator terkelola
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	66	73,39	76	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	78	79	80

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya Pemerintah kabupaten Jombang dalam mencapai target, sasaran pembangunan dan arah kebijakan di tahun 2023 yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Kominfo Tahun 2018-2023. Program pembangunan Dinas Kominfo tahun 2023 pada dasarnya melanjutkan program tahun sebelumnya untuk meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengacu pada Kepmen 050-5889. Karena dalam perkembangannya di pertengahan tahun anggaran Renstra berjalan terdapat perubahan di subkegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu pada tahun ini juga berfokus pada program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya :

1. Melaksanakan Visi dan Misi Bupati;
2. Orientasi pada peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas;
3. Melaksanakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Isu Penting Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo;
4. Meningkatkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Tahun 2023 antara lain :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika

Indikator Sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota

Indikator Sasaran 2 : Indeks Pelayanan Publik dibidang komunikasi dan informatika

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kematangan Kapabilitas Proses dan Kapabilitas Layanan SPBE

Indikator Sasaran : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi AKIP

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Rekapitulasi Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk kegiatan pembangunan Dinas Kominfo Tahun 2023 dianggarkan dari sumber dana APBD Kabupaten Jombang untuk kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.241.325.539,00 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dan dilaksanakan melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggar dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- 1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.3.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 1.3.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3.3 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.3.4 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.3.5 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.3.6 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.4.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.4.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.5.3 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.5.4 Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Program Informasi dan Komunikasi Publik

1.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1.7.1 Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

1.7.2 Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik

1.7.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan
Kemitraan Komunitas

1.7.4 Sub Kegiatan Penyediaa/Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Informasi dan Komunikasi Punlik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain
dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota

2.1.2 Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah
Daerah

2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

2.2.1 Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota

2.2.2 Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

2.2.3 Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis Elektronik

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

3.1.1 Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

3.1.2 Membangun Metadata Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4.1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

4.1.1 Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Publik tahun 2023 dilaksanakan sebagai berikut :

Bidang Kehumasan dan Komunikasi Publik

- Tersosialisasikannya aplikasi LAPOR SP4N kepada masyarakat;
LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu. LAPOR! dikembangkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan sosialisasi LAPOR SP4N untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan aduan permasalahan atas pelayanan publik. Kegiatan dimaksudkan untuk menjemput informasi atau aduan warga atas pelayanan umum maupun pengaduan warga terhadap fasilitas umum. Selain itu juga mengenalkan pada masyarakat tentang tata cara penyampaian aduan melalui saluran yang benar dan tepat.
- Tersosialisasikan UU informasi publik kepada kepala desa;

PPID yang ada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melaksanakan sosialisasi Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui sosialisasi ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Terlaksananya Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat;
- Terlaksananya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat kepada pengurus KIM;
- Terlaksananya Warjok lokal (menginformasikan kepada masyarakat kegiatan informasi daerah), bulaga (pelayanan masyarakat) dan publik speaking di sekolah Jombang;

Berdasarkan keterbukaan informasi publik untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui program “Warung Pojok” disingkat Warjok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mengadakan rutin kegiatan dialog interaktif dan solutif pada setiap bulannya Kegiatan dialog interaktif dan solutif lokal dikemas dalam

perbincangan atau percakapan dengan topik yang dipilih menghadirkan narasumber.

Kegiatan Bupati Layani Warga atau disebut Bulaga merupakan pelayanan gratis kepada masyarakat Diantaranya, berupa cek kesehatan, kemudahan pembayaran pajak serta mendapatkan informasi tentang pajak, pelayanan SIM Keliling dan pembayaran pajak kendaraan, pelayanan warga berupa administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, KTP Elektronik dsb. Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tupoksi melaksanakan penyebaran diseminasi dan pelayanan IT untuk kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat.

- Penyebarluasan informasi terkait kegiatan Pemerintah Daerah melalui website Jombangkan dan Kanal resmi media social
Untuk percepatan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan kebijakan pemerintah, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang menyebarluaskan informasi melalui website jombangkab.go.id, Instagram pemkab Jombang dan channel Youtube Kabupaten Jombang.
- Penyebarluasan informasi melalui kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana radio dilakukan melalui radio Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Suara Jombang FM (SJFM).

Program siaran radio dengan 7 program perhari melalui SJFM meliputi:

**PROGRAM SIAR REGULER
RADIO PUBLIK LOKAL SUARA JOMBANG FM 104,1**

Jam	Nama Program	Format Program	Komposisi
04.00	Opening & Lagu Indonesia Raya	Putar File untuk opening siaran	Pop
04.00-07.00	-Tartil 'Qur'an, Tarhim, Adzan Shubuh -Kajian Islam Pagi Suara Jombang	Putar File Pengajian KH. Djamaluddin Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Al Muhibbin Tambakberas Jombang	Religi Islami
07.00-08.00	Cakrawala sesi I	INFORMASI Siaran kata; Menghadirkan informasi lokal Jombang (politik, ekonomi, sosial, budaya) ; Mengundang pendengar untuk menyampaikan informasi atau berkomentar baik melalui jalur telepon, WA, atau sms; Konfirmasi dengan narasumber terkait dengan isu lokal yang sedang hangat dibicarakan.	Indonesia pertengahan (rancak)
		1. INFORMASI perbincangan isu isu nasional	

08.00-10.00	Cakrawala Sesi II	2. TALKSHOW INTERAKTIF Senin : 07.00-08.00 Dinamika Jawa Timur ; Relay Program Asosiasi LPPL Jawa Timur 09.00-09.40 Insidental 10.00-11.00 Nasional Is Me ; Relay Program Asosiasi LPPL, Persada.Id Selasa : 09.00-09.40 Talkshow Anti Hoax (MAFINDO Koord. Jombang) 10.00-10.40 PELESIR ; Talkshow Pariwisata bersama BPPD Kab. Jombang Rabu : 09.00-09.40 Pojok Kesehatan (Dinas Kesehatan Kab. Jombang) 11.00-11.40 Talkshow Covid 19 bersama IDI Kab. Jombang Kamis : 09.00-09.40 Kiat mandiri bersama UMKM dan Enterpreneur Muda Jombang 10.00-11.00 Talkshow Kesehatan Pulih Ekonomi Bangkit KPC PEN; Persada.Id. Jum'at : 09.00-09.40 Halo Anak; BPPKB-PPPA >>> Membuka line telepon, WA atau SMS untuk interaktif pendengar Putar File Berita hasil produksi liputan Tim Reportase	Indonesia Pertengahan (boleh slow)
10.00-12.00	Break In Time	HIBURAN Siaran kata dengan menyisipkan info info ringan seputar lifestyle, selebritis dan info info ringan lainnya. >> Putar Adzan Dhuhur sesuai dengan jadwal waktu Shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya dengan Hot clock yang ditetapkan	Mancanegara Easy Listening (Non Hits)
12.00 – 13.00	Jombang Interaktif	INFORMASI Dibawakan oleh satu orang announcer dibantu oleh dua orang gatekeeper. Menghadirkan tema yang beragam di setiap harinya. Tema diambil dari kebutuhan masyarakat atas informasi maupun pelayanan publik. Nara sumber dihadirkan melalui wawancara telepon dengan announcer. Jumlah nara sumber menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan tema. Nara sumber diambilkan dari OPD terkait atau lembaga-lembaga swasta yang berwenang untuk memberikan klarifikasi atas suatu masalah, atau berwenang untuk memberikan informasi. Nara sumber sudah dipersiapkan sebelumnya untuk bisa standby dalam rentang waktu antara 12.00 s/d 13.00. Program ini mengundang masyarakat untuk berinteraktif melalui dua jalur (telepon dan WA), untuk memberikan laporan keluhan atau komentar atas tema yang dibahas.	Manca – Indo Hits
13.00-15.00	Gayeng Marem	HIBURAN Siaran kata dengan menggunakan bahasa Jawa Jombangan; menemani pendengar beristirahat siang	Gending &

		dengan gending dan campur sari; membuka line interaktif dengan pendengar melalui telepon, WA atau SMS. Informasi terkini lokal/nasional/Internasional (sumber: Detik.com/ Kompas/Liputan6/SS.net ,	Campur Sari
15.00-17.00	DANSA Dangdut Asyik Suara Jombang	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beraktifitas santai di sore hari' membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Konvensional
17.00-18.00	Jelang Petang	- Putar File Lagu - Putar Adzan Maghrib menyesuaikan dengan jadwal waktu shalat untuk daerah Jombang dan sekitarnya - Putar Murattal	Lagu Religi
18.00-19.00	Senada indonesia POP	HIBURAN Putar File ; segmentasi anak muda; men ghadirkan tangga nada lagu teratas di setiap minggunya;	Lagu Indonesia HITS
19.00-21.00	Goyang Dangdut Malam	HIBURAN Siaran Kata; menemani pendengar beristirahat di malam hari; membuka line interaktif telepon, WA atau SMS	Dangdut Koplo Terbaru
21.00 – 22.00	Muaik Ingat-Ingat	HIBURAN Putar File ; segmentasi dewasa; men ghadirkan lagu oldies Indonesia; Pengantar istirahat malam	Lagu oldies Indonesia era 70-80an
22.00-23.00	Ngakak Bareng Kartolo	Putar File Senin – Rabu, Jum'at : Lawakan Kartolo Kamis : Shalawat Minggu : Wayang Kulit	-
23.00	Closing & Lagu Wajib Nasional	Putar file lagu untuk closing siaran	
Program PERNIK			
Menit ke-00 02 15 30 45	Update Info Covid 19 Informasi Hoax Lintas Informasi Lokal Info Korupsi KPK Lintas Informasi Nasional	Putar File yang diproduksi dan ready setiap hari	-

Bidang Aplikasi Teknologi Informasi

- Penyediaan jaringan FO untuk OPD perkotaan maupun jaringan wireless kecamatan untuk meningkatkan kapasitas jaringan internet 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Pembangunan jaringan FO untuk seluruh OPD milik Pemkab, untuk meningkatkan legalitas penggunaan FO;

- Peningkatan kapasitas jaringan wireless (penggantian perangkat) pada 21 kecamatan dan repeater untuk meningkatkan kapasitas jaringan internet 306 desa/kelurahan guna fasilitasi digitalisasi desa;
- Bandwidth 1 GB untuk OPD;
- Penyediaan ruang server yang sesuai dengan standart SNI untuk fasilitasi hosting aplikasi pemerintah;
- Integrasi aplikasi pemerintahan dan layanan umum;
- Pengembangan dan pembangunan aplikasi baru untuk mendukung layanan pemerintahan dan layanan umum sebagaimana diamanatkan dalam perpres SPBE.

Bidang Statistik

- Mendorong OPD untuk update data sektoral secara berkala melalui portal satu data Kabupaten Jombang (satudata.jombangkab.go.id);
Portal Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Untuk memudahkan OPD dalam menginput data, dan memudahkan pengguna data untuk memperoleh data. Dinas Kominfo pada saat ini telah membangun aplikasi Portal Satu Data dan MOU dengan BPS Jombang dalam kemudahan pemenuhan data statistik.
- Sistem elektronik yang dilakukan pengamanan informasi

Rincian total kebutuhan dana/pagu indikatif progam dan kegiatan usulan tahun 2023 ditampilkan dalam tabel berikut:

TABEL 3.1
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SKPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Catatan	Prakiraan Maju (2024)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12,753,943,859	APBD			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur		100%	6,305,655,309	APBD		100%	27,225,885,072
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan		100%	27,560,000	APBD		100%	6,284,519,003
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	11,060,000	APBD		2 Dokumen	29,707,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	16,500,000	APBD		5 Laporan	25,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu		100%	5,141,765,824	APBD		100%	4,707,500
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 Orang/bulan	4,927,422,234	APBD		35 Orang/bulan	5,130,122,954
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	209,586,000	APBD		4 Dokumen	4,831,480,104

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rancangan Awal RKPD				Catatan	Prakiraan Maju (2024)	
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	4,757,500	APBD		1 Laporan	293,464,600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	373,450,685	APBD		100%	5,178,250
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	13,805,635	APBD		12 Paket	284,911,589
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	65,246,000	APBD		12 Paket	15,186,199
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	164,383,900	APBD		6 Paket	56,371,920
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	51,753,750	APBD		5 Paket	91,239,720
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	11,496,000	APBD		3 Dokumen	56,900,250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan	66,765,400	APBD		5 Laporan	12,645,600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	535,589,800	APBD		100%	52,567,900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	251,000,000	APBD		12 Laporan	597,778,060

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rancangan Awal RKPD				Catatan	Prakiraan Maju (2024)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	284,589,800	APBD		12 Laporan	276,100,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	227,289,000	APBD		100%	321,678,060
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	42,110,000	APBD		1 Unit	241,998,900
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		17 Unit	86,550,000	APBD		17 Unit	46,321,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	50,199,000	APBD		2 Unit	85,965,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		63 Unit	48,430,000	APBD		63 Unit	55,218,900
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)		63	2,237,677,550	APBD		63	54,494,000
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di		84,5				84,5	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Catatan	Prakiraan Maju (2024)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bidang komunikasi dan informatika							
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik		3,2	2,237,677,550	APBD		3,2	2,181,719,320
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		5 dokumen	375,502,500	APBD		5 dokumen	2,181,719,320
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		4 dokumen	160,779,008	APBD		4 dokumen	528,309,650
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		28 dokumen	1,596,686,000	APBD		28 dokumen	154,526,570
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7 unit	104,710,042	APBD		7 uni	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi		Level 2	4,210,611,000	APBD		Level 2	4,001,563,610
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)		8 indikator terkelola				8 indikator terkelola	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar		100%	2,554,238,000	APBD		100%	2,165,614,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Catatan	Prakiraan Maju (2024)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah							
		Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain		100%				100%	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	16,300,000	APBD		2 Dokumen	18,150,000
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		68 Unit	2,537,938,000	APBD		68 Unit	2,147,464,000
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi		20%	1,656,373,000	APBD		20%	1,835,949,610
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	211,306,800	APBD		1 Dokumen	232,772,210
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 Unit	784,941,000	APBD		1 Unit	864,146,800

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rancangan Awal RKPD				Catatan	Prakiraan Maju (2024)	
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		2 Unit	660,125,200	APBD		2 Unit	739,030,600
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				331,450,000	APBD			674,846,500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan		100%	331,450,000	APBD		100%	379,846,500
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika		3,53				3,53	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang		3 dokumen	331,450,000	APBD		3 dokumen	379,846,500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		9 Dokumen	231,204,000	APBD		9 Dokumen	269,575,900
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		28 Dokumen	100,246,000	APBD		28 Dokumen	110,270,600
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				135,938,900	APBD			280,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Rancangan Awal RKPD				Catatan	Prakiraan Maju (2024)	
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik		100%	135,938,900	APBD		100%	140,000,000
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi		100%	135,938,900	APBD		100%	140,000,000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		4 Perangkat Daerah	135,938,900	APBD		4 Perangkat Daerah	140,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

Urutan Prioritas	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Kab.Jombang	100%	6,305,655,309	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kab.Jombang	100%	27,560,000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Jombang	2 Dokumen	11,060,000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Jombang	5 Laporan	16,500,000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Kab.Jombang	100%	5,141,765,824	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Jombang	35 Orang/bu	4,927,422,324	APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Jombang	4 Dokumen	209,586,000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Jombang	1 Laporan	4,757,500	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab.Jombang	100%	373,450,685	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Jombang	12 Paket	13,805,635	APBD

Urutan Prioritas	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Dana	Sumber Dana
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Jombang	12 Paket	65,246,000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Jombang	6 Paket	164,383,900	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Jombang	5 Paket	51,753,750	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab.Jombang	3 Dokumen	11,496,000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Jombang	5 Laporan	66,765,400	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Kab.Jombang	100%	535,589,800	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Jombang	12 Laporan	251,000,000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Jombang	12 Laporan	284,589,800	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kab..Jombang	100%	227,289,000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Jombang	1 Unit	42,110,000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Jombang	17 Unit	86,550,000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Jombang	2 Unit	50,199,000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Jombang	63 Unit	48,430,000	APBD
RENJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. JOMBANG						95

Urutan Prioritas	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Dana	Sumber Dana
		si				
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Kab.Jombang	63	2,237,677,500	APBD
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	Kab.Jombang	84,5		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Kab.Jombang	3,2	1,953,681,200	APBD
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab.Jombang	5 Dokumen	375,502,500	APBD
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab.Jombang	4 Dokumen	160,779,008	APBD
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab.Jombang	45 Dokumen	1,596,686,000	APBD
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	7 Unit	104,710,042	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Kab.Jombang	Level 2	4,210,611,000	APBD
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Kab.Jombang	8 indikator terkelola		
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Terkoneksi Jaringan Intra Sesuai Standar Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab.Jombang	100%	2,554,238,000	APBD
		Persentase Sub domain sesuai standart Penyelenggaraan Sub Domain	Kab.Jombang	100%		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	2 Dokumen	16,300,000	APBD
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab.Jombang	68 Unit	2,537,938,000	APBD

Urutan Prioritas	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Dana	Sumber Dana
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Kab.Jombang	20%	1,656,373,000	APBD
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Jombang	1 Dokumen	211,306,000	APBD
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab.Jombang	1 Unit	784,941,000	APBD
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab.Jombang	2 Unit	660,125,200	APBD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Kab.Jombang	100%	331,450,000	APBD
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	Kab.Jombang	3,53		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral Kabupaten Jombang	Kab.Jombang	3 dokumen	331,450,000	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab.Jombang	9 Dokumen	231,204,000	APBD
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab.Jombang	28 Dokumen	100,246,000	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Kab.Jombang	100%	135,938,900	APBD
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang memiliki keamanan informasi	Kab.Jombang	100%	135,938,900	APBD
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab.Jombang	4 Perangkat Daerah	135,938,900	APBD
TOTAL ANGGARAN					13,221,332,759	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang pada tahun 2023 dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan *Good Governance*.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Jombang, maka secara terus menerus perlu dilakukankajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kominfo ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Jombang, 7 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**


BUDI WINARNO, ST, M.Si
Perbina Tk. I
NIP. 19741001 199901 1 001